

**Sejarah UUD Tahun 1945 dan
dinamika pelaksanaannya dengan
menambah khazanah pengetahuan
tentang Lembaga Negara**

Dr. apt. NOVI YANTIH, M.Si.



CAKUPAN

01

Latar Belakang Penetapan UUD Tahun 1945

02

Tujuan dan Manfaat Penulisan

03

Asal Mula Perumusan UUD Tahun 1945

04

Isi dan Ketentuan-ketentuan UUD Tahun 1945

05

Dinamika Pelaksanaan UUD Tahun 1945

06

Kontribusi Lembaga terhadap Pelaksanaan UUD Tahun 1945

07

Constraints and Challenges in the Implementation of the 1945 Constitution

08

Expectations and Efforts to Improve the Implementation of the 1945 Constitution

01

Latar Belakang Penetapan UUD Tahun 1945

Proses Penetapan UUD Tahun 1945

01

Proses pembentukan UUD 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk oleh Jepang pada 1 Maret 1945.

BPUPKI mengadakan dua kali sidang: Sidang pertama (29 Mei - 1 Juni 1945) yang membahas dasar negara, dan Sidang kedua (10 - 17 Juli 1945) yang membahas rancangan UUD.

Dalam sidang pertama, Ir. Soekarno menyampaikan pidato yang dikenal sebagai *"Lahirnya Pancasila"* pada 1 Juni 1945, yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia.

02

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI):

Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI yang bertugas melanjutkan pekerjaan BPUPKI, termasuk menyelesaikan dan menetapkan UUD. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang pertama yang memutuskan tiga hal penting:

1. Mengesahkan dan menetapkan **Undang-Undang Dasar 1945** sebagai konstitusi negara.
2. Memilih **Ir. Soekarno** sebagai Presiden dan **Drs. Mohammad Hatta** sebagai Wakil Presiden.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan legislatif sementara.

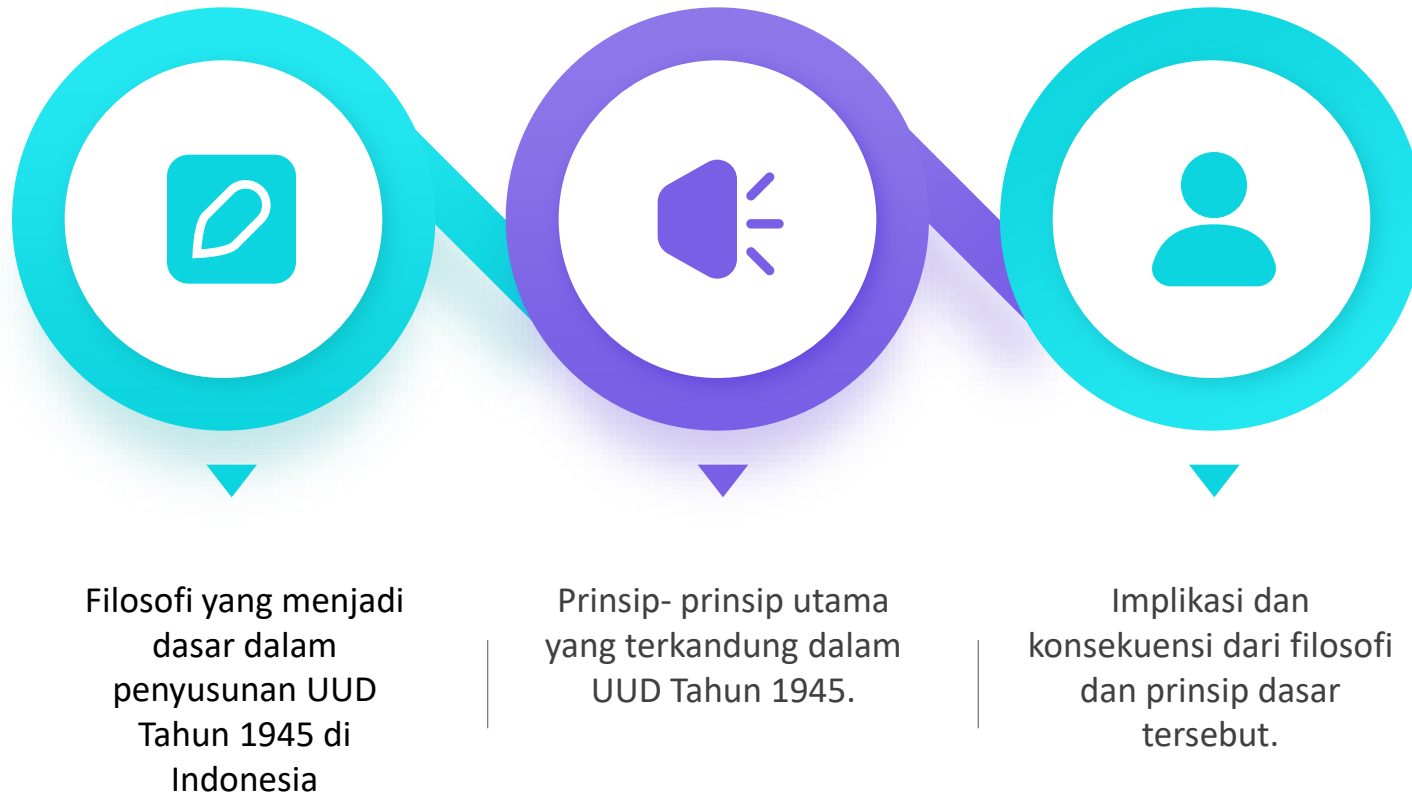
03

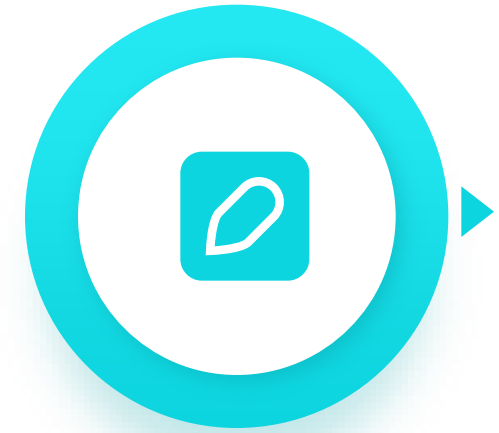
Pemberlakuan:

Setelah disahkan oleh PPKI, **UUD 1945** mulai berlaku sebagai dasar hukum dan konstitusi negara Republik Indonesia.

UUD 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal), dan Penjelasan.

Filosofi dan Prinsip Dasar UUD Tahun 1945





Filosofi yang menjadi dasar dalam penyusunan UUD Tahun 1945 di Indonesia terdiri dari beberapa elemen kunci:

1.Pancasila: Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan nilai-nilai luhur yang mengutamakan kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Lima sila Pancasila menjadi pedoman dalam pembentukan konstitusi.

2.Sovereignty of the People: UUD 1945 menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam prinsip demokrasi yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3.Keadilan Sosial: Konstitusi mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan komitmen untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi.

4.Negara Kesatuan: UUD 1945 mengakui Indonesia sebagai negara kesatuan yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman.

5.Pembangunan Moral dan Etika: UUD 1945 juga mengandung nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam penyelenggaraan negara, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang beradab.

Penyusunan UUD 1945 mencerminkan usaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kerangka hukum dan pemerintahan Indonesia.



UUD Tahun 1945 mengandung beberapa prinsip utama yang menjadi landasan penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia. Berikut adalah beberapa prinsip tersebut:

- 1. Kedaulatan Rakyat:** Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang mengekspresikan diri melalui pemilihan umum dan partisipasi dalam pemerintahan.
- 2. Negara Kesatuan:** Indonesia adalah negara kesatuan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan di antara beragam suku, agama, dan budaya.
- 3. Demokrasi:** Penerapan sistem demokrasi yang berdasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat, serta menjamin hak-hak politik bagi semua warga negara.
- 4. Keadilan Sosial:** UUD menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial.
- 5. Pembangunan Berkelanjutan:** Menyusun kebijakan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
- 6. Pendidikan dan Kesehatan:** Menjamin hak pendidikan dan kesehatan bagi seluruh rakyat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 7. Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Mengakui dan melindungi hak asasi manusia sebagai bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 8. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban:** Mengedepankan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban terhadap masyarakat dan negara.

Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka dasar bagi tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, serta menjadi acuan dalam penyusunan undang-undang dan kebijakan publik.

1. Kedaulatan Rakyat

- Implikasi:** Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.

- Konsekuensi:** Mendorong terciptanya pemerintahan yang responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat.

2. Negara Kesatuan

- Implikasi:** Mewajibkan pemerintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meskipun terdapat keberagaman budaya dan suku.

- Konsekuensi:** Perlu adanya kebijakan yang mengedepankan toleransi, integrasi, dan dialog antar kelompok masyarakat untuk mencegah konflik.

3. Demokrasi

- Implikasi:** Penerapan prinsip demokrasi mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam pemerintahan.

- Konsekuensi:** Membutuhkan sistem pemilihan umum yang adil dan bebas, serta pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

4. Keadilan Sosial

- Implikasi:** Pemerintah berkewajiban untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

- Konsekuensi:** Perlu adanya program-program sosial dan ekonomi yang merata, termasuk dalam pendidikan dan kesehatan.

5. Pembangunan Berkelanjutan

- Implikasi:** Kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesejahteraan masa depan.

- Konsekuensi:** Perlu adanya perencanaan yang matang dan inklusif untuk menjaga sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem.

6. Pendidikan dan Kesehatan

- Implikasi:** Pendidikan dan kesehatan menjadi hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.

- Konsekuensi:** Anggaran negara harus dialokasikan secara memadai untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

7. Perlindungan Hak Asasi Manusia

- Implikasi:** Pemerintah harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap individu.

- Konsekuensi:** Mendorong pengawasan dan penegakan hukum yang adil untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia.

8. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

- Implikasi:** Masyarakat harus sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

- Konsekuensi:** Diperlukan pendidikan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan.

Kesimpulan

Filosofi dan prinsip dasar UUD 1945 tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga memandu kebijakan publik, etika pemerintahan, dan partisipasi masyarakat. Implikasi dan konsekuensinya mencakup penciptaan sistem pemerintahan yang adil, pengembangan masyarakat yang sejahtera, serta penguatan identitas bangsa yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.



Implikasi dan
konsekuensi dari filosofi
dan prinsip dasar
tersebut.

02

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan Penulisan Sejarah UUD Tahun 1945

01

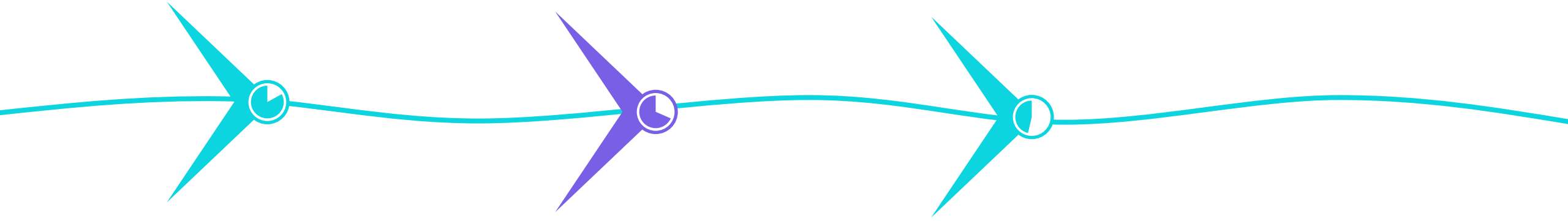
Penulisan sejarah UUD Tahun 1945

03

Penulisan sejarah UUD Tahun 1945 dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.

02

Kebutuhan untuk memahami dan menghargai perjalanan dan nilai- nilai yang terkandung dalam UUD Tahun 1945.



Tujuan Penulisan Sejarah UUD Tahun 1945

Penulisan sejarah UUD Tahun 1945 memiliki peranan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang dasar-dasar negara dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah beberapa cara bagaimana penulisan sejarah tersebut dapat berkontribusi:

1. Membantu Memahami Konteks Sejarah

- **Pendidikan Sejarah:** Dengan menyajikan latar belakang sejarah, seperti perjuangan kemerdekaan dan pengaruh ideologi yang ada, masyarakat dapat memahami alasan dan konteks munculnya UUD 1945.
- **Kesadaran Sejarah:** Pengetahuan tentang proses perumusan dan pengesahan UUD membantu masyarakat menyadari perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan kedaulatan.

2. Menanamkan Nilai-nilai Pancasila

- **Peneguhan Identitas Nasional:** Dengan mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar UUD, masyarakat akan lebih menghargai dan menghayati identitas bangsa.
- **Pendidikan Karakter:** Penulisan sejarah dapat digunakan sebagai alat untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Pancasila, seperti gotong royong, keadilan, dan toleransi.

3. Meningkatkan Partisipasi Publik

- **Keterlibatan Masyarakat:** Dengan memahami sejarah UUD, masyarakat akan lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, mendorong partisipasi dalam proses demokrasi.
- **Aspirasi Rakyat:** Kesadaran akan sejarah mendorong masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Penulisan sejarah UUD Tahun 1945 memiliki peranan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang dasar-dasar negara dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah beberapa cara bagaimana penulisan sejarah tersebut dapat berkontribusi:

4. Menjaga Warisan Sejarah

- Pelestarian Memori Kolektif:** Penulisan sejarah membantu menjaga ingatan kolektif tentang perjuangan para pendiri bangsa, sehingga nilai-nilai tersebut tidak terlupakan.
- Inspirasi untuk Generasi Mendatang:** Sejarah yang dituliskan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk melanjutkan perjuangan dan menjaga keutuhan bangsa.

5. Mendorong Kritis terhadap Kebijakan

- Refleksi Sosial:** Memahami sejarah UUD memberikan kerangka untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam konteks nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi.
- Advokasi dan Keterbukaan:** Masyarakat yang teredukasi tentang sejarah UUD cenderung lebih kritis dan aktif dalam mengadvokasi hak-hak mereka serta menuntut akuntabilitas pemerintah.

6. Menghadapi Tantangan Modern

- Adaptasi Nilai-nilai:** Pengetahuan sejarah UUD memungkinkan masyarakat untuk mengadaptasi dan menerapkan nilai-nilai dasar dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman, seperti globalisasi dan teknologi.
- Dialog dan Penyelesaian Masalah:** Sejarah yang baik dapat menjadi medium untuk dialog antar kelompok masyarakat dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan pandangan.

Manfaat dalam Menambah Khazanah Pengetahuan tentang Lembaga Negara

Meningkatkan pengetahuan tentang lembaga- lembaga negara.



Memperkaya khazanah pengetahuan tentang negara dan sistem pemerintahan.



Memperluas wawasan masyarakat terhadap lembaga negara.



Penulisan sejarah UUD Tahun 1945 bukan hanya sekadar dokumentasi, tetapi juga alat pendidikan yang vital untuk membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat. Dengan memahami sejarah konstitusi, masyarakat akan lebih menghargai hak-hak mereka, terlibat aktif dalam proses demokrasi, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa yang lebih baik.

03

Asal Mula Perumusan UUD Tahun 1945

Perkembangan Pembentukan UUD Tahun 1945



Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi awal perumusan UUD Tahun 1945.



Perumusan UUD Tahun 1945 melibatkan Panitia Sembilan dan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).



Sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 dihadiri oleh 62 anggota.

Pembaruan Struktur Pemerintahan dalam UUD Tahun 1945

UUD Tahun 1945 mengubah bentuk negara Indonesia yang semula merupakan negara kesatuan menjadi negara persatuan.

UUD Tahun 1945 memuat ketentuan tentang pembentukan badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif.

Pemerintahan Indonesia yang berdasarkan UUD Tahun 1945 secara resmi dimulai pada tanggal 17 Agustus 1950.



04

Isi dan Ketentuan-ketentuan UUD Tahun 1945

Pembukaan UUD Tahun 1945



Pembukaan UUD Tahun 1945 memuat alasan dan dasar yang melandasi berdirinya negara Indonesia.

.....



Memuat cita-cita nasional yang ingin dicapai seperti melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

.....



Mengandung nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Dasar Negara dan Ketentuan Pokok dalam UUD Tahun 1945



01

UUD Tahun 1945 menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.



02

Menjelaskan hak dan kewajiban warga negara, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.



03

Menentukan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah serta antara lembaga negara.

05

Dinamika Pelaksanaan UUD Tahun 1945

Implementasi UUD Tahun 1945 dalam Praktik Pemerintahan



Struktur Pemerintahan dalam UUD Tahun 1945

Menguraikan struktur pemerintahan yang dijelaskan dalam UUD Tahun 1945. Membahas pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Menyoroti peran dan fungsi dari masing-masing lembaga dalam struktur pemerintahan.



Fungsi Lembaga-lembaga Negara dalam UUD Tahun 1945

Menjelaskan peran dan fungsi dari lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD Tahun 1945, seperti MPR, DPR, DPD, dan MA. Menguraikan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing lembaga. Membahas hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugasnya.



Perkembangan dan Perubahan UUD Tahun 1945



Amendemen UUD Tahun 1945

Menjelaskan tentang proses perubahan UUD Tahun 1945 melalui amendemen.

Membahas alasan dan tujuan dari amendemen UUD Tahun 1945.

Menguraikan beberapa amendemen yang telah dilakukan dan dampaknya terhadap sistem pemerintahan.



Perubahan-perubahan Signifikan pada UUD Tahun 1945

Mengidentifikasi perubahan signifikan yang telah terjadi pada UUD Tahun 1945.

Menjelaskan alasan dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tersebut.

Membahas konsekuensi dari perubahan-perubahan tersebut terhadap pelaksanaan UUD Tahun 1945.



Amendemen UUD Tahun 1945

UUD 1945 mengalami **empat kali** amendemen antara tahun 1999 hingga 2002, yang mengubah beberapa aspek penting dari sistem pemerintahan dan hukum Indonesia untuk menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi dan tata negara.

Pelaksanaan amendemen UUD 1945:

Amendemen Pertama: Sidang Umum MPR Tahun 1999 (tanggal 14–21 Oktober 1999).

Amendemen Kedua: Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 (tanggal 7–18 Agustus 2000).

Amendemen Ketiga: Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 (tanggal 1–9 November 2001).

Amendemen Keempat: Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 (tanggal 1–11 Agustus 2002).

Amendemen UUD Tahun 1945 merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman, meningkatkan kualitas demokrasi, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Melalui amendemen, diharapkan sistem ketatanegaraan Indonesia semakin kuat, responsif, dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat.

Proses penetapan UUD 1945 ini merupakan tonggak penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dan menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan negara hingga saat ini.



Alasan

1. Kebutuhan untuk Menyesuaikan dengan Perkembangan Zaman:

Seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi, perlu adanya penyesuaian untuk mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat modern.

2. Meningkatkan Kualitas Demokrasi:

Amendemen bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, menjamin keterwakilan rakyat, dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.

3. Mendukung Desentralisasi:

Penambahan dan perubahan pasal-pasal terkait otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih kepada daerah, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pemerintahan.

4. Menjamin Hak Asasi Manusia:

Perubahan dibuat untuk lebih menegaskan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari penyelenggaraan negara.

5. Penguatan Lembaga Negara:

Amendemen bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat kedudukan lembaga-lembaga negara, seperti presiden, DPR, dan MA, dalam sistem ketatanegaraan.

Tujuan Amendemen UUD 1945

1. Memperkuat Sistem Ketatanegaraan:

Menjamin adanya pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan.

2. Meningkatkan Partisipasi Publik:

Mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan umum dan pengambilan keputusan.

3. Menjamin Keadilan Sosial:

Mengintegrasikan prinsip keadilan sosial ke dalam berbagai kebijakan publik dan pemerintahan, sehingga menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

4. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah:

Mengatur mekanisme pengawasan yang lebih baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pemerintah lebih akuntabel kepada rakyat.

5. Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia:

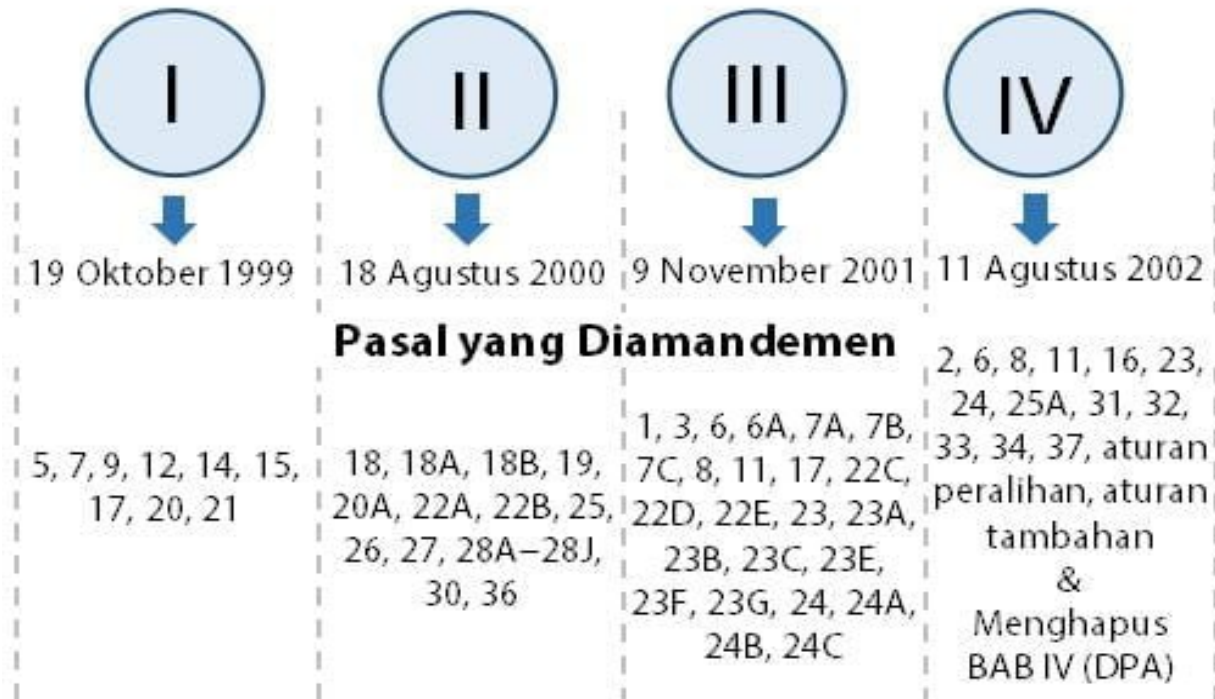
Menambahkan pasal-pasal yang secara eksplisit melindungi hak asasi manusia, menciptakan landasan hukum yang lebih kuat untuk penegakan hak-hak tersebut.

6. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan:

Menyusun kerangka hukum yang mendukung pembangunan berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Amendemen UUD 1945 telah dilakukan dalam empat tahap, yang secara signifikan mengubah struktur dan sistem pemerintahan Indonesia.

Amandemen UUD 1945



Sistematika UUD 1945

Sebelum Amandemen

1. Pembukaan: 4 alinea
2. Batang tubuh:
 - 16 Bab
 - 37 Pasal
 - 49 ayat
 - 4 Pasal aturan peralihan
 - 2 ayat aturan tambahan
3. Penjelasan:
Penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal

Setelah Amandemen

1. Pembukaan: 4 alinea
2. Batang tubuh:
 - 21 Bab
 - 73 Pasal
 - 170 ayat
 - 3 Pasal aturan peralihan
 - 2 ayat aturan tambahan
3. Penjelasan:
tidak ada

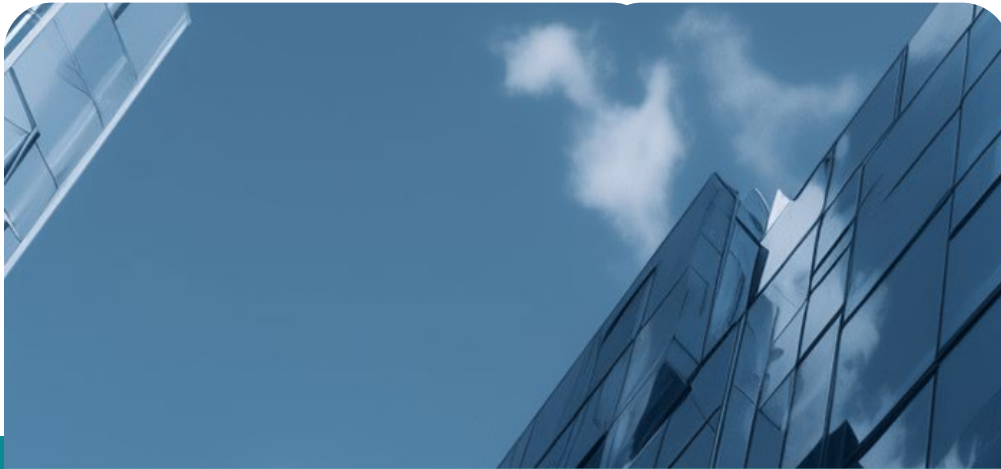
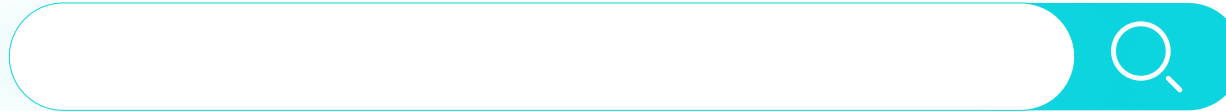
ALUR PROSES AMANDEMEN UUD 1945



06

Kontribusi Lembaga terhadap Pelaksanaan UUD Tahun
1945

Peran Lembaga dalam Menegakkan Kedaulatan Hukum



Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Konstitusi

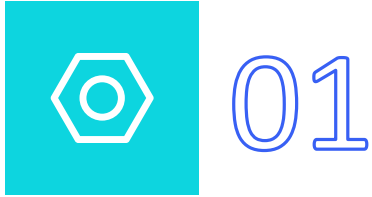
Mahkamah Konstitusi berperan dalam uji materi atas UU Memastikan keberadaannya sejalan dengan UUD Tahun 1945. Memberikan putusan hukum yang mengatur pelaksanaan atas sesuatu Undang- Undang.



Peran Badan Legislatif dalam Membuat Undang-Undang

Badan Legislatif berperan membuat Undang- Undang. Mempertimbangkan kelayakan dan relevansi UU Proses itu diharapkan mencerminkan aspirasi masyarakat.

Pengawasan Lembaga terhadap Kinerja Pemerintah



Peran Badan Pengawas dalam Memeriksa Pelaksanaan UUD Tahun 1945

Badan Pengawas membantu memeriksa pelaksanaan UUD Tahun 1945.

Mengawasi kinerja Pemerintah dalam penerapan hukum.

Menyelaraskan upaya proteksi masyarakat terhadap hak- haknya.



Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Kinerja Peradilan

Komisi Yudisial bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kepatuhan hakim dalam menjalankan tugasnya.

Mengawasi peradilan dalam penerapan hukum secara adil.

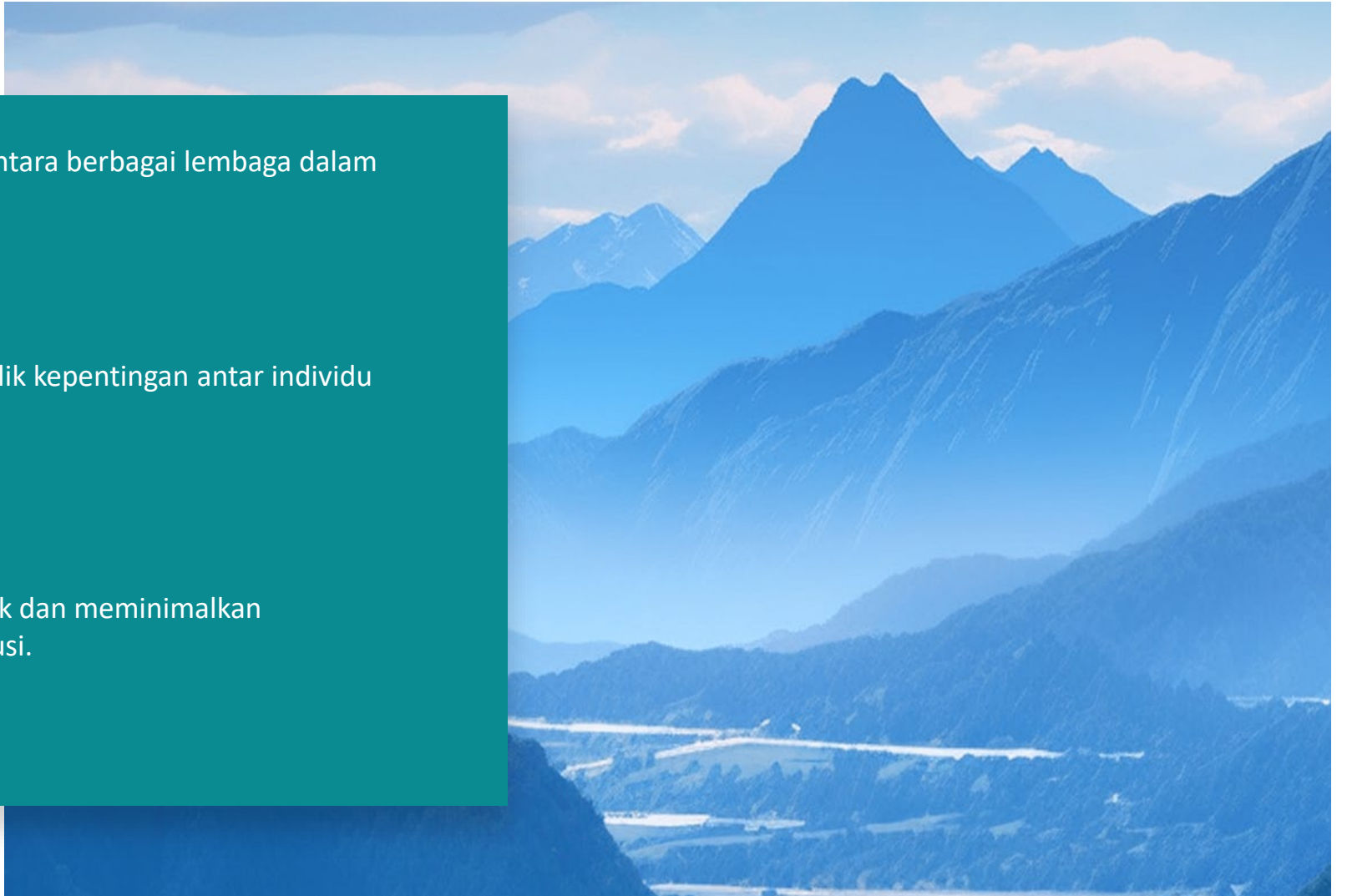
Membantu memastikan bahwa pengambilan keputusan secara akurat dan menggunakan hukum dan peraturan yang berlaku.

07

Kendala dan Tantangan dalam Implementasi UUD 1945

Konflik antar Lembaga dan Konflik Kepentingan

- Menjelaskan konflik yang mungkin timbul antara berbagai lembaga dalam pelaksanaan UUD 1945.
- Membahas tantangan yang timbul dari konflik kepentingan antar individu atau kelompok.
- Menyoroti pentingnya menyelesaikan konflik dan meminimalkan dampaknya terhadap implementasi Konstitusi.



Failure of Implementing the 1945 Constitution in Regional Areas

01



Menjelaskan tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi UUD 1945 di daerah.

02



Membahas alasan di balik kegagalan implementasi dan konsekuensinya.

03



Mengeksplorasi kemungkinan solusi untuk meningkatkan implementasi Konstitusi di wilayah regional.

08

Expectations and Efforts to Improve the Implementation of the 1945 Constitution

Strengthening the Role of Institutions in the Democratic Process

01

Explaining the importance of institutions in ensuring the effective implementation of the 1945 Constitution.

03

Highlighting the need for transparent and accountable institutions to enhance the implementation of the Constitution.

02

Discussing strategies to strengthen the role of institutions in upholding democratic values and principles.



Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Hak dan Kewajiban Konstitusional



01

Membahas pentingnya pengetahuan dan kesadaran publik tentang hak dan kewajiban konstitusional.



02

Mengeksplorasi cara untuk meningkatkan pemahaman publik tentang UUD 1945 dan implikasinya.

1. Formal Education
2. Seminar Discussion/FGD
3. Media Usage
4. Awareness Campaign
5. Simulation activities
6. Legal Literacy
7. Penta Helix Collaboration
8. Strengthening in the Family Environment



03

Menyoroti peran kampanye pendidikan dan kesadaran dalam mempromosikan partisipasi warga dan keterlibatan dengan Konstitusi.



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"

Thanks

Dr. apt. Novi Yantih, M.Si.

